

Abstrak

Penelitian ini menganalisa tentang dampak-dampak atau akibat hukum yang akan timbul ketika pelaksaan pemilihan kepala daerah yang harus dilaksanakan serentak pada tahun 2024. Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimanakah dampak penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 terhadap jabatan Kepala Daerah ?. Metode penelitian dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah dampak Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 akan ada ratusan kabupaten/kota dan provinsi yang akan dipimpin pejabat kepala daerah, Hal ini terjadi pertentangan (kontradiksi) antar peraturan perundang-undangan perihal masa jabatan Kepala Daerah hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020, dimana hanya menjabat sampai 2024, atau hanya sekitar kurang dari 4 tahun masa jabatan. Hal ini menimbulkan suatu keadaan ketidakpastian hukum terjadi di masyarakat, dimana Berdasarkan pasal 162 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, memegang jabatan selama 5 tahun, hal yang sama juga tercantum pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan wali kota adalah selama 5 tahun.

Kata Kunci : Dampak Hukum, Pemilihan Kepala Daerah, Serentak

Abstract

This study analyzes the impacts or legal consequences that will arise when the implementation of regional head elections that must be held simultaneously in 2024. The formulation of the problem from this study is How will the impact of holding simultaneous Regional Head Elections in 2024 on the position of Regional Head?. The research method in analyzing the problems in this study is normative juridical. The result of this study is the impact of the simultaneous regional elections that will be held in 2024 there will be hundreds of regencies/cities and provinces that will be led by regional head officials, this is a conflict (contradiction) between laws and regulations regarding the term of office of the Regional Head as a result of the election of regional heads in 2020, where they only serve until 2024, or only about less than 4 years of term. This creates a state of legal uncertainty occurring in the community, which is based on article 162 of Law Number 10 of the Year 2016, concerning the Election of Governors, Regents and Mayors, that governors, deputy governors, regents and deputy regents, as well as mayors and deputy mayors, hold office for 5 years, the same is also stated in Article 60 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which states that the term of office of regional heads, namely governors, regents, and mayors, is for 5 years.

Keyword : Legal Impact, Regional Head Elections, Simultaneously